

Analisis pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Kalurahan terhadap indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul

Yadianto Anggoro^{1*}, Akhsyim Afandi²

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia

²Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: yadianto.aang@gmail.com

JEL Classification Code:
G18, E61

Kata kunci:

Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan, Indeks Desa Membangun, Kebijakan Anggaran

Email penulis:

akhsyim@uii.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol4.iss2.art1

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the influence of Village Funds (Dana Desa), Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa), and the Special Financial Assistance for Privilege Funds (Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan) on the Village Development Index (Indeks Desa Membangun, IDM) in Gunungkidul Regency.

Methods – The study employs panel data analysis on 114 villages in Gunungkidul Regency over the 2019–2023 period.

Findings – The results indicate that Village Funds, Village Fund Allocation, and Special Financial Assistance for Privilege Funds significantly affect the Village Development Index. Village Fund Allocation has a greater effect on IDM improvement than Village Funds and Special Financial Assistance. Additionally, Special Financial Assistance for Privilege Funds has a more pronounced impact on IDM enhancement for villages categorized as developing and advanced.

Implication – The findings imply that the management of Village Funds, Village Fund Allocation, and Special Financial Assistance should be data-driven, transparent, and accountable, with active community involvement and rigorous oversight. Collaboration between the government and stakeholders is essential to ensure effective utilization and maximize the benefits for local communities.

Originality – This study contributes to the literature by analyzing fiscal policies related to Village Funds, Village Fund Allocation, and Special Financial Assistance for Privilege Funds in Gunungkidul Regency using panel data.

Originality – This research analyzes the influence of DD, ADD, and especially BKK DAIS Kalurahan budget policies in Gunungkidul Regency to be relevant and important to be carried out in an effort to increase IDM.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.

Metode – Penelitian ini menggunakan analisis data panel pada 114 desa di Kabupaten Gunung Kidul pada periode tahun 2019-2023.

Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan BKK Dana Keistimewaan memiliki pengaruh terhadap Indeks Desa Membangun. Alokasi Dana Desa lebih berpengaruh terhadap peningkatan IDM dibandingkan Dana Desa dan BKK Dana Keistimewaan. BKK Dana Keistimewaan lebih berpengaruh terhadap peningkatan IDM pada desa yang berstatus berkembang dan maju.

Implikasi – Penelitian ini berimplikasi pada bahwa Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan harus berbasis data, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat serta pengawasan ketat. Kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci efektivitas dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah usaha mencakup penciptaan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Setiap desa menerima dana dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN) dengan nilai yang besar. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 mengatur alokasi dana desa, yang terdiri dari Alokasi Dasar (65%), Alokasi Afirmasi (1%), Alokasi Kinerja (4%), dan Alokasi Formula (30%), untuk mendorong pembangunan desa yang merata. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1, besar anggaran DD di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2019-2021 dan di tahun 2022 mengalami penurunan, dan kembali meningkat di tahun 2023.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

Tahun	Pagu Anggaran Dana Desa
2019	136.052.137.000
2020	142.022.003.000
2021	144.614.409.000
2022	144.366.117.000
2023	175.848.933.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian penting dari keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan public. Anggaran ADD yang dialokasikan oleh Kabupaten Gunungkidul kepada Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019-2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

Tahun	Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa
2019	98.617.955.500
2020	103.060.047.200
2021	103.499.813.800
2022	105.317.212.500
2023	112.417.212.500

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki status khusus yang memberikan hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Dana keistimewaan (DAIS) ini diberikan kepada DIY sebagai bagian dari hak istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tentang penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan ini

mencakup urusan-urusan seperti Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus DAIS dari Pemerintah Daerah DIY kepada Desa di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Anggaran Bantuan Keuangan Khusus DAIS Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023

Tahun	Bantuan Keuangan Khusus Dais Desa/Kalurahan
2021	15.323.134.000
2022	33.488.100.000
2023	41.749.460.000

Sumber: Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa/kalurahan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa/kalurahan. Penelitian Iftitah dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa dana desa dan PADes yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak positif terhadap pembangunan dan kemandirian ekonomi desa sementara ADD tidak memberikan pengaruh signifikan karena lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian serupa perlu dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan anggaran DD, ADD, dan terutama BKK DAIS Kalurahan, yang tidak muncul di penelitian-penelitian sebelumnya, terhadap IDM di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Dais) bagi desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan BKK Dais bagi desa dalam meningkatkan IDM di Kabupaten Gunungkidul serta membandingkan tingkat peningkatan IDM antara desa yang menerima BKK Dais dengan desa yang tidak menerima BKK Dais di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari et al (2025) di Kabupaten Banjar Jawa Barat menunjukkan bahwa dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap IDM, sementara itu bagi hasil pajak dan retribusi yang memiliki pengaruh terhadap IDM.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tambunan et al (2020) untuk studi kasus di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa dana desa belum mampu mengembangkan kondisi desa melalui indikator IDM.

Penelitian yang dilakukan Rezkia dan Yunani (2023) menganalisis pengaruh dari dana desa dan infrastruktur terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa Dana Desa dan Infrastruktur memiliki pengaruh terhadap Indeks desa Membangun.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramukti dan Arifin (2020) menunjukkan bahwa belanja pembangunan desa dipengaruhi secara signifikan oleh dana desa, bantuan keuangan daerah, dan pendapatan asli desa yang berpengaruh positif, sementara alokasi dana desa menunjukkan pengaruh negatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Paniradya Kaistimewan DIY selaku Perangkat Daerah penyusun kebijakan dan perencana urusan keistimewaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Data sekunder yang digunakan yaitu data dana desa, alokasi dana desa, alokasi dana keistimewaan kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan data indeks desa membangun tahun 2019 s.d 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan dari time series dan data cross section, dalam

penelitian ini data yang digunakan yaitu dari tahun 2019 s.d 2023 di 144 desa Kabupaten Gunungkidul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel (*Pooled data*). Metode ini merupakan data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) 2019-2023 dan data lintas-individu (*cross section*) 144 desa menggunakan bantuan Eviews 12.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menguji apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Data panel merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section (Widarjono, 2018). Berikut adalah model persamaan regresi data panel yang diterapkan dalam penelitian ini:

Keterangan :

Indeks Desa Membangun (indeks)

DD = Dana Desa (rupiah)

ADD = Alokasi Dana Desa (rupiah)

BKKDAISKal = Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (rupiah)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

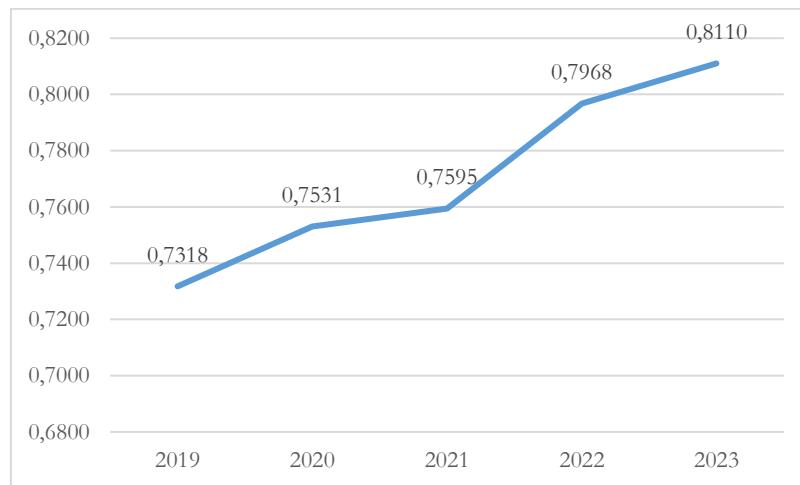
ε_{it} = Variabel di luar model

i = entitas ke-*i*

t = periode ke-t

Hasil dan Pembahasan

Indeks Desa Membangun mencerminkan perkembangan kemandirian desa sesuai dengan implementasi Undang-Undang Desa. Indeks ini membantu pemerintah mengarahkan kebijakan dengan lebih tepat melalui intervensi yang sesuai, partisipasi masyarakat, dan karakteristik wilayah seperti tipologi dan modal sosial. Dengan demikian, intervensi pembangunan dapat lebih efektif dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan desa.

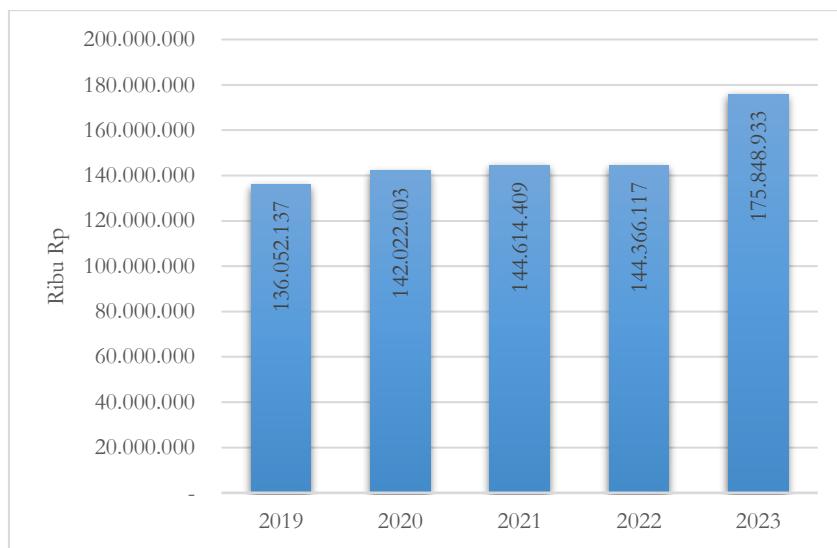


Gambar 1. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gunungkidul selama 2019-2023 menunjukkan tren positif dan konsisten. Namun, terdapat fluktuasi di beberapa desa. Pada 2019-2020, 25 desa mengalami penurunan IDM, dengan Desa Giritirto mengalami penurunan terbesar (-0,0618), sementara Desa Pengkok mencatat peningkatan tertinggi (0,1859). Pada 2020-2021, 11 desa menurun, 81 tetap, dan 52 meningkat, dengan penurunan terbesar di Desa Wonosari (-0,0667) dan kenaikan tertinggi di Desa Selang (0,1223). Pada 2021-2022, 4 desa menurun, 17 tetap, dan 123 meningkat, dengan penurunan terbesar di Desa Siraman (-0,0192) dan kenaikan tertinggi di Desa Genjahan (0,2007). Pada 2022-2023, 43 desa menurun, 7 tetap, dan 94 meningkat,

dengan Desa Girimulyo mengalami penurunan terbesar (-0,0948) dan Desa Gedangrejo peningkatan tertinggi (0,1911).

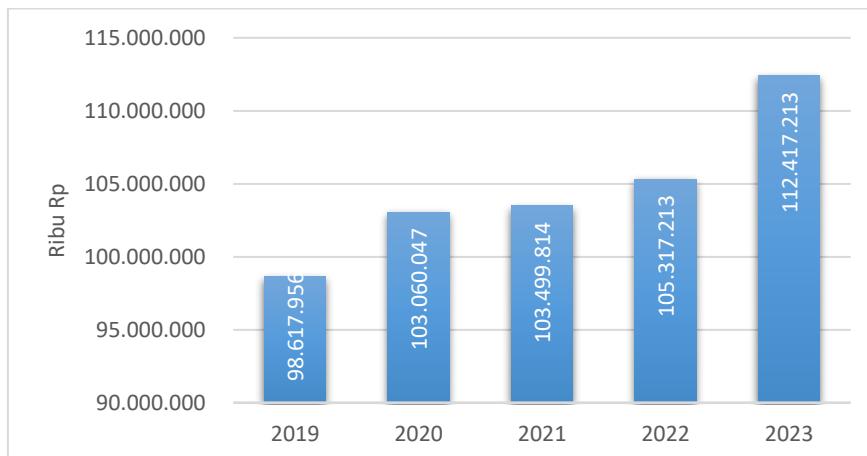
Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung desa menjadi kuat, mandiri, dan sejahtera yang dipergunakan untuk pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.



Gambar 2. Anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Gunungkidul 2019-2023

Dana Desa di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada 2019, total dana desa tercatat Rp136,05 miliar dan meningkat 4,39% pada 2020 menjadi Rp142,02 miliar. Kenaikan ini relatif stabil pada 2021-2022 dengan anggaran sekitar Rp144 miliar. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada 2023, mencapai Rp175,85 miliar atau meningkat 21,81% dari tahun sebelumnya, kemungkinan untuk percepatan pembangunan dan pemulihan pasca-pandemi. Fluktuasi juga terjadi di tingkat desa, di mana beberapa desa mengalami penurunan anggaran, seperti Desa Melikan (-Rp175,2 juta pada 2020) dan Desa Karangduwet (-Rp272,4 juta pada 2023). Sebaliknya, beberapa desa mengalami peningkatan besar, seperti Desa Tegalrejo yang mendapat tambahan Rp1,14 miliar pada 2023.

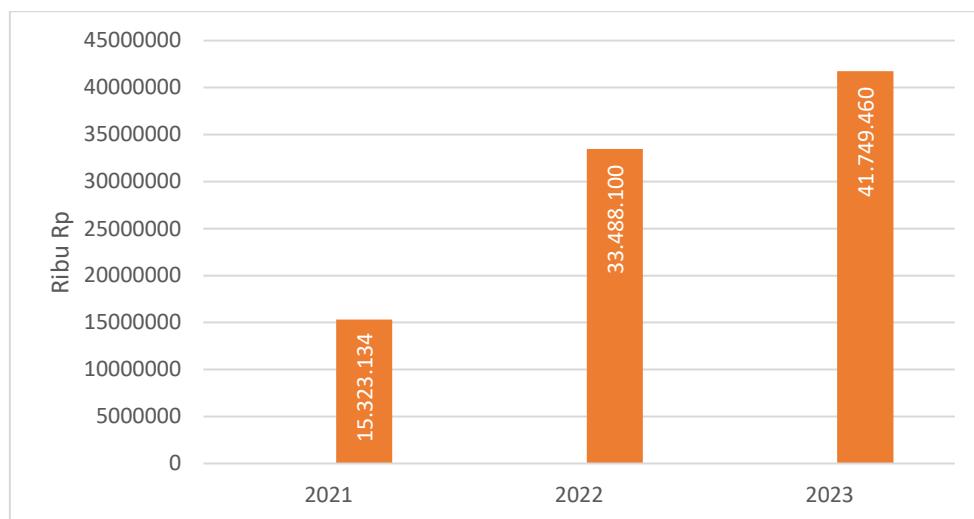
Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, mendorong pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antar desa.



Gambar 3. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul 2019-2023

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gunungkidul mengalami tren peningkatan dari 2019 hingga 2023, meskipun terjadi fluktuasi. Pada 2019, ADD tercatat Rp98,61 miliar dan meningkat 4,50% pada 2020 menjadi Rp103,06 miliar. Kenaikan berlanjut hingga 2021 dan 2022, dengan lonjakan signifikan pada 2023 sebesar 6,74% menjadi Rp112,41 miliar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, terutama untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat desa, beberapa mengalami penurunan, seperti Desa Serut (berkurang Rp162,1 juta pada 2020) dan Desa Mulo (berkurang Rp17,5 juta pada 2023), sementara peningkatan tertinggi terjadi di Desa Botodayaan (bertambah Rp300 juta pada 2020) dan Desa Kampung (+Rp103,9 juta pada 2023).

BKK DAIS Kalurahan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kalurahan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat diuruskan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. BKK DAIS Kalurahan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.



Gambar 4. Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan

Alokasi anggaran BKK DAIS Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul meningkat signifikan dari 2021 hingga 2023, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Lonjakan terbesar terjadi pada 2023, dengan dana yang difokuskan untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal. Peningkatan ini bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Data menunjukkan bahwa pada 2022, 47 desa mengalami penurunan anggaran, terbesar di Desa Banyusoco (berkurang Rp292,7 juta), sementara peningkatan tertinggi terjadi di Desa Putat (bertambah Rp1,9 miliar). Pada 2023, 49 desa mengalami penurunan, terbesar di Desa Bejiharjo (berkurang Rp2,05 miliar), sedangkan kenaikan tertinggi terjadi di Desa Ngalang (bertambah Rp1,63 miliar).

Analisis Data Panel

Hasil estimasi untuk model pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dana bantuan keuangan khusus dana keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun dilakukan melalui beberapa hasil analisis dengan menunjukkan hasil secara keseluruhan dan membuat estimasi pada kelompok kondisi Indeks Desa Membangun. Proses pemilihan model dilakukan dengan melakukan pengujian untuk 3 bentuk estimasi model data panel yaitu *Common Effect*, *Random Effect*, dan *Fixed Effect*. Hasil estimasi dan hasil uji pemilihan model ditunjukkan pada tabel

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi untuk Keseluruhan Model dan Setiap Kategori IDM

Variabel Independen	Variabel Dependen : IDM								
	Keseluruhan IDM			IDM Mandiri			IDM Berkembang dan Maju		
	CE	RE	FE	CE	RE	FE	CE	RE	FE
C	0.691***	0.525***	0.599***	0.743***	0.542***	0.664***	0.650***	0.538***	0.598***
DD	0.026**	0.065***	0.059***	0.022	0.069***	0.059***	0.045***	0.059***	0.056***
ADD	0.063***	0.239***	0.145***	0.045	0.254***	0.102***	0.052*	0.187***	0.107***
DAIS	0.066***	0.034***	0.043***	0.040***	0.022***	0.032***	0.093***	0.096***	0.102***
R-square	0.136	0.736	0.245	0.114	0.666	0.221	0.152	0.646	0.275
F-statistic	37.421	10.940	77.266	14.214	7.661	31.316	22.678	7.035	48.253
Prob (F-stat)	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Catatan: Simbol ***, **, dan * masing-masing menunjukkan tingkat signifikansi pada taraf 1 persen, 5 persen, dan 10 persen.

Proses pemilihan model dilakukan dengan melakukan Uji chow pada keseluruhan model dimana didapatkan nilai probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*. Uji Hausman Regresi Panel menunjukkan nilai *probability cross-section random* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*. Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM (Mandiri) menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*. Uji Hausman Regresi Panel IDM (Mandiri) menunjukkan nilai *probability cross-section random* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*. Uji Chow Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju) menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*. Uji Hausman Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju) menunjukkan nilai *probability cross-section random* sebesar 0,0016 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 5. Hasil Model *Fixed Effect* untuk Seluruh Model Regresi

Variabel Independen	Variabel Dependen : IDM					
	Keseluruhan IDM		IDM Mandiri		IDM Berkembang dan Maju	
	Koef.	Prob.	Koef.	Prob.	Koef.	Prob.
C	0.525	0.000	0.542	0.000	0.538	0.000
DD	0.065	0.000	0.069	0.000	0.059	0.000
ADD	0.239	0.000	0.254	0.000	0.187	0.000
DAIS	0.034	0.000	0.022	0.000	0.096	0.000
R-square	0.736		0.666		0.646	
F-statistic	10.940		7.661		7.035	
Prob (F-stat.)	0.000		0.000		0.000	

Hasil estimasi pada tabel 5 menunjukkan hasil utama dimana pada hasil untuk keseluruhan model menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Sementara itu untuk kelompok IDM (Mandiri) Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun dimana hal ini sejalan dengan penelitian dari Arina et al (2021) di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menunjukkan bahwa dana desa mendukung indicator-indikator dalam Indeks Desa Membangun. Alokasi Dan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Pada hasil IDM (Berkembang dan Maju) Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Alokasi Dan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

Hasil regresi data panel statis dengan Model Fixed Effect menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Setiap penambahan Rp1 miliar Dana Desa meningkatkan IDM dengan variasi antara 0,058641 hingga 0,076022, tergantung pada model yang digunakan. Regresi dengan variabel IDM, DD, dan ADD menunjukkan dampak terbesar, dengan koefisien 0,076022, menjadikannya model paling efektif dalam menjelaskan hubungan antara Dana Desa dan peningkatan IDM. Model lain yang mencakup variabel tambahan seperti BKK DAIS Kal atau status IDM tertentu (Mandiri, Berkembang, dan Maju) juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun dengan tingkat dampak yang lebih rendah.

Hasil regresi data panel statis dengan Model Fixed Effect menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Setiap penambahan Rp1 miliar Alokasi Dana Desa meningkatkan IDM dengan variasi antara 0,186691 hingga 0,281122, tergantung pada model yang digunakan. Regresi dengan variabel IDM, DD, dan ADD menunjukkan dampak terbesar, dengan koefisien 0,281122, menjadikannya model paling efektif dalam menjelaskan hubungan antara Alokasi Dana Desa dan peningkatan IDM. Model lain yang mencakup variabel tambahan seperti BKK DAIS Kal atau status IDM tertentu (Mandiri, Berkembang, dan Maju) juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun dengan tingkat dampak yang lebih rendah.

Hasil regresi data panel statis dengan Model Fixed Effect menunjukkan bahwa BKK DAIS Kal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Setiap penambahan Rp1 miliar BKK DAIS Kal meningkatkan IDM dengan variasi antara 0,022444 hingga 0,095529, tergantung pada model yang digunakan. Model dengan variabel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal menunjukkan dampak terbesar, dengan koefisien 0,095529. Ini menunjukkan bahwa alokasi dana BKK DAIS Kal memberikan pengaruh tertinggi terhadap peningkatan IDM di desa yang berstatus Berkembang dan Maju, menjadikannya model paling efektif dalam menjelaskan hubungan antara BKK DAIS Kal dan peningkatan IDM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Rezkia dan Yunani (2023) dari adanya pengaruh dari dana desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai Kalimantan Selatan, sementara itu Iftitah dan Wibowo (2022) di Kabupaten Gowa juga menyimpulkan hal yang sama terkait dengan pentingnya Dana Desa dengan adanya penyertaan modal pada BUMDes serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Halim dan Taryani (2023) implikasi dari adanya dana desa terhadap pembangunan desa yang ditunjukkan dari peningkatan IDM dapat dilakukan dengan kebijakan penyaluran dana desa perlu dilanjutkan dengan memastikan kesesuaian penggunaan dana terhadap prioritas nasional, serta memperkuat kapasitas dan komitmen pemerintah desa yang didukung oleh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat desa.

Pengujian dengan model Fixed Effect regresi panel menunjukkan bahwa variabel-variabel ini mampu menjelaskan IDM dengan tingkat kontribusi antara 64,6% hingga 73,6%. Di antara ketiga variabel tersebut, ADD terbukti paling efektif dalam meningkatkan IDM karena dikelola langsung oleh pemerintah desa, memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya, serta berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro, dan kegiatan sosial. Sementara itu, DD lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur besar dengan pendekatan top-down, yang membuat efektivitasnya lebih rendah dibandingkan ADD. Adapun BKK DAIS Kal lebih berdampak pada desa dengan status berkembang dan maju, karena dana ini digunakan untuk penguatan infrastruktur sosial, seperti balai budaya, desa wisata, dan program padat karya, yang mendukung peningkatan kualitas hidup serta percepatan transisi desa berkembang menjadi maju. Sebaliknya, dampak BKK DAIS Kal pada desa mandiri lebih terbatas karena kebutuhan mereka lebih kompleks, seperti pengembangan ekonomi skala besar dan integrasi teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ADD merupakan instrumen paling efektif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, sementara BKK DAIS Kal lebih relevan bagi desa yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kal) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gunungkidul. Model regresi Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabilitas IDM dengan kontribusi antara 64,6% hingga 73,6%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. ADD terbukti memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan IDM dibandingkan DD dan BKK DAIS Kal, karena fleksibilitas pengelolaannya yang lebih tinggi serta kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa. Selain itu, BKK DAIS Kal lebih efektif dalam meningkatkan IDM pada desa berkembang dan maju dibandingkan desa mandiri, karena programnya lebih berfokus pada penguatan identitas budaya dan sosial ekonomi, seperti pembangunan Balai Budaya dan Desa Wisata. Namun, efektivitas BKK DAIS Kal dalam meningkatkan IDM pada desa mandiri masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kal), yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan berbasis data yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat melalui pelatihan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Selain itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola dana desa secara efisien. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik juga diperlukan guna memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana desa harus lebih ditingkatkan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, program pembangunan desa sebaiknya tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi desa yang terus berkembang serta meningkatkan akses informasi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Arina, A. I., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.22 No.3, 22-41.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Volume 4, Nomor 1, 51-71.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 48, No. 1, Juni 2022, 17-36.
- Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 163 tahun 2023 tentang Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108. Biro Umum. Jakarta.
- Lestari, D., Imron, M., & Indartini, M. (2025). Pengaruh Dana Transfer ke Desa Terhadap Nilai Indeks Desa Membangun di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka. <https://doi.org/10.33319/jamer.v6i1.140>.
- Pramukti, E., & Arifin, M. (2020). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa Pendapatan Asli Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018).
- Rezkia, L., & Yunani, A. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11067>
- Tambunan, B., Sihombing, M., & Harahap, R. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Perspektif, 9, 439-446. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.